

# Kebijakan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Fungsi Guru Di SMPN 3 Peureulak

Afwiyah<sup>1</sup>

<sup>1</sup> SMPN 3 Peureulak, Aceh Timur, Aceh, Indonesia

---

## Article Info

### Article history:

Received April 15, 2024

Revised Mei 21, 2024

Accepted Juni 11, 2024

---

### Keywords:

Kebijakan  
Kepala Sekolah  
Meningkatkan  
Fungsi Guru

---

## ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Kebijakan Kepala Sekolah dalam meningkatkan fungsi Guru di SMPN 3 Peureulak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kepala sekolah merumuskan kebijakan dalam meningkatkan fungsi guru di SMPN 3 Peureulak. Secara metodologis, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (empiris) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer yaitu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, tata usaha, guru dan siswa. Sedangkan buku arsip, laporan kegiatan dan dokumen pelaksanaan manajemen merupakan data skunder. Dalam pengumpulan data, metode yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam menganalisis data peneliti menggunakan teknik analisa kualitatif dengan langkah-langkah pemaparan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Temuan umum dalam penelitian ini adalah Perumusan Kebijakan Kepala Sekolah di SMPN 3 Peureulak dilakukan dengan perumusan kebijakan, Implementasi dan evaluasi melalui musyawarah, diskusi dan forum rapat.

---

## Corresponding Author:

Afwiyah

SMPN 3 Peureulak, Aceh Timur, Aceh, Indonesia.

[afwiyahperlak@gmail.com](mailto:afwiyahperlak@gmail.com)

---

## 1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan visi untuk membangun sistem pendidikan yang kuat dan berwibawa di Indonesia. Sistem ini bertujuan untuk memberdayakan seluruh warga negara agar mampu berkembang menjadi manusia berkualitas yang dapat menghadapi tantangan zaman. Dalam konteks global, kualitas manusia yang dibutuhkan oleh Indonesia adalah mereka yang mampu bersaing dengan bangsa lain.

Namun, berdasarkan laporan Bank Dunia, sistem penyelenggaraan pendidikan nasional Indonesia menghadapi dua tantangan utama: kelemahan dalam birokrasi pengelolaan pendidikan dan lemahnya manajemen sekolah. Salah satu masalah utama yang diidentifikasi adalah peran kepala sekolah yang dianggap lemah dalam mengelola sekolah. Beberapa faktor yang menyebabkan manajemen sekolah tidak efektif termasuk terbatasnya otonomi kepala sekolah, kurangnya keterampilan manajerial, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sekolah. Kepala sekolah memiliki peran penting dalam keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Kepala sekolah yang profesional diharapkan mampu mengelola sumber daya sekolah dengan baik, berkolaborasi dengan guru dan staf, serta memenuhi kebutuhan pendidikan yang terus berkembang. Seorang kepala sekolah yang kompeten dapat membantu sekolah berkembang sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan dunia pendidikan.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 162 Tahun 2003 menggariskan tugas-tugas Kepala Sekolah sebagai edukator, manajer, administrator, supervisor, pemimpin, pengusaha, dan pencipta iklim yang kondusif (disingkat EMASLEC). Kepala Sekolah memiliki peran kunci dalam mengelola semua sumber daya pendidikan di sekolah, dengan tanggung jawab untuk mewujudkan visi dan misi sekolah. Menurut Wahjosumidjo, kepemimpinan Kepala Sekolah sebagai manajer mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan upaya anggota organisasi, serta memberdayakan sumber

daya pendidikan yang tersedia secara optimal guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kepala Sekolah harus memiliki kemampuan untuk merencanakan, mengorganisasikan, membina, melaksanakan, serta mengendalikan sekolah dan seluruh sumber daya manusia, termasuk guru.

Guru memainkan peran krusial dalam pendidikan, menjadi ujung tombak dalam setiap upaya pembaharuan pendidikan. Keberhasilan peningkatan kualitas pendidikan sangat bergantung pada kemampuan guru dalam menguasai materi pelajaran, strategi pembelajaran, dan kemampuan untuk memotivasi siswa mencapai prestasi. Tugas utama guru adalah mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan, mengajar berarti menyampaikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sementara melatih berarti mengembangkan keterampilan pada siswa.

Undang-undang Republik Indonesia mendefinisikan guru sebagai pendidik profesional yang bertanggung jawab untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada berbagai jenjang pendidikan. Tugas guru sangat penting dalam menciptakan proses pendidikan yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu, perlu ada upaya berkelanjutan dalam mengembangkan dan meningkatkan tugas serta fungsi guru, agar kompetensi mereka tetap relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berubah.

Kepala Sekolah, sebagai pemimpin sekolah, memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa guru-guru di bawahnya dapat menjalankan peran mereka dengan profesionalisme yang tinggi. Upaya pengembangan ini bukan hanya penting untuk peningkatan kualitas pendidikan, tetapi juga untuk menjamin bahwa sekolah dapat beradaptasi dengan tuntutan dan tantangan zaman. Untuk itu, peran kepala sekolah sangat strategis bagi pengembangan sekolah.

Kepala Sekolah memiliki peran penting dalam memberdayakan guru dan tenaga kependidikan untuk mencapai tujuan pendidikan sekolah. Strategi yang tepat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang kompetitif namun tetap harmonis, di mana setiap individu memiliki kesempatan untuk meningkatkan profesionalismenya. Kepala Sekolah harus mendorong partisipasi aktif semua guru dan tenaga kependidikan dalam berbagai kegiatan yang mendukung program sekolah.

Sebagai manajer, Kepala Sekolah perlu mengoptimalkan dan mengakses sumber daya sekolah untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Dalam menjalankan tugas manajerial, Kepala Sekolah harus berpedoman pada prinsip-prinsip seperti keunggulan, mufakat, kesatuan, persatuan, antusiasme, keakraban, dan integritas. Ini mencakup penyusunan program yang matang, pengorganisasian personalia, dan pemberdayaan guru serta tenaga kependidikan untuk memastikan sumber daya sekolah digunakan secara maksimal dan efektif.

Untuk mencapai keberhasilan dalam pengelolaan sekolah, Kepala Sekolah harus memiliki kemampuan dalam mendelegasikan tugas, mengalokasikan pekerjaan, menetapkan standar kualitas, memantau hasil, dan mengontrol biaya. Fungsi manajemen ini tidak hanya penting untuk memastikan operasional sekolah berjalan lancar, tetapi juga untuk memberikan arah perkembangan sekolah baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Keith dan Girling, manajemen pendidikan memberikan kontribusi sebesar 32% terhadap keberhasilan dan kegagalan belajar siswa. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran manajemen dalam pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan perlu mengembangkan teori dan ilmu administrasi yang kuat, yang mencakup formulasi dan pemeriksaan proposisi teoritis, penelitian praktik yang sistematis, serta penerapan teori dari ilmu sosial lainnya untuk menyelesaikan masalah administrasi pendidikan.

Konsep-konsep baru dalam manajemen pendidikan ini membawa harapan besar bagi peningkatan kualitas dan fungsi administrasi di sekolah-sekolah. Dengan pendekatan yang tepat, Kepala Sekolah dapat memainkan peran sentral dalam mengarahkan dan mengembangkan sekolah ke arah yang lebih baik, memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan pendidikan yang optimal.

Para ahli pendidikan umumnya sepakat bahwa manajemen dalam konteks pendidikan memiliki empat fungsi utama: perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (leading), dan pengawasan (controlling). Perencanaan adalah proses awal dalam manajemen yang melibatkan pemikiran dan penentuan semua aktivitas yang akan dilakukan di masa depan untuk mencapai tujuan organisasi. Fungsi perencanaan ini sangat penting karena menjadi dasar bagi tindakan selanjutnya. Langkah pertama dalam perencanaan adalah menyusun langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Beberapa aspek penting dalam fungsi perencanaan meliputi: penetapan tujuan dan standar, penentuan aturan dan prosedur, pembuatan rencana, dan peramalan, yaitu memprediksi kondisi masa depan yang mungkin mempengaruhi pelaksanaan rencana.

Pengorganisasian adalah proses pengelompokan semua tugas, tanggung jawab, wewenang, dan komponen dalam suatu organisasi agar tercipta sistem kerja yang efisien dan efektif. Fungsi ini penting untuk memastikan bahwa semua elemen dalam organisasi bekerja secara harmonis menuju tujuan yang telah

ditetapkan. Dalam pengorganisasian, beberapa langkah utama meliputi: pengelompokan tugas, pendelegasian wewenang, dan pembentukan struktur organisasi.

Kedua fungsi ini merupakan fondasi dari proses manajemen yang berkelanjutan, yang nantinya akan diikuti dengan fungsi pengarahan (leading) dan pengawasan (controlling). Setiap fungsi manajemen berperan penting dalam mencapai tujuan organisasi, dan mereka saling terkait untuk menciptakan sistem kerja yang efektif dalam dunia pendidikan.

Secara etimologi, istilah "Kepala Sekolah" merupakan padanan dari istilah "school principal" dalam bahasa Inggris, yang tugasnya menjalankan "principalship" atau kekepalasekolahan. Kekepalasekolahan merujuk pada segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi sebagai Kepala Sekolah. Dalam konteks ini, Kepala Sekolah adalah pemimpin utama di sekolah yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengarahkan semua aktivitas dan sumber daya yang ada di sekolah agar mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Kepala Sekolah terdiri dari dua kata: "kepala" yang berarti ketua atau pemimpin, dan "sekolah" yang merujuk pada institusi tempat proses pendidikan berlangsung. Kepala Sekolah dipilih secara selektif dari kalangan guru yang ada di suatu sekolah, dengan kriteria tertentu yang mencakup kemampuan untuk memimpin dan mengarahkan lembaga pendidikan tersebut. Sebagai pemimpin, Kepala Sekolah harus memiliki visi yang mampu melihat perubahan dan masa depan dalam konteks globalisasi, serta membawa sekolah ke arah yang lebih baik.

Definisi Kepala Sekolah adalah tenaga fungsional yang berasal dari guru, yang diberi tugas untuk memimpin sekolah sebagai tempat berlangsungnya proses belajar mengajar dan interaksi antara guru dengan peserta didik. Dalam perannya, Kepala Sekolah bertanggung jawab atas kelancaran dan keberhasilan semua urusan pengelolaan sekolah, baik secara formal kepada atasannya maupun secara informal kepada masyarakat yang telah mempercayakan pendidikan anak-anak mereka kepada sekolah tersebut.

Kompetensi Kepala Sekolah merujuk pada seperangkat kemampuan yang melibatkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh seorang Kepala Sekolah. Kompetensi ini tidak hanya mencakup aspek kognitif, tetapi juga kondisi afektif, nilai-nilai, dan keterampilan tertentu yang sesuai dengan karakteristik jabatan Kepala Sekolah. Kompetensi inilah yang memungkinkan Kepala Sekolah untuk mengambil keputusan yang tepat dalam penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan potensi sumber daya yang ada di sekolah, dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Dengan demikian, seorang Kepala Sekolah yang kompeten adalah seseorang yang memiliki kemampuan berpikir dan bertindak secara konsisten, yang memungkinkan mereka untuk secara efektif memimpin dan mengelola sekolah sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan yang lebih tinggi. Kompetensi ini mencakup kemampuan untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengawasi seluruh aspek operasional sekolah dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas pendidikan.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah, Kepala Sekolah harus memenuhi lima standar kompetensi utama, yaitu: (1) Kompetensi Kepribadian, ini mencakup integritas moral, sikap profesional, serta tanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin sekolah. Kepala Sekolah harus menunjukkan kepribadian yang matang dan stabil, sehingga mampu menjadi panutan bagi seluruh warga sekolah. (2) Kompetensi Manajerial, kepala Sekolah harus memiliki kemampuan dalam mengelola seluruh sumber daya sekolah, baik itu personil, keuangan, maupun sarana dan prasarana. Manajemen yang baik melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan dengan tujuan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam operasional sekolah. (3) Kompetensi Kewirausahaan, kompetensi ini menuntut Kepala Sekolah untuk memiliki jiwa kewirausahaan, yang berarti mampu berpikir kreatif, inovatif, dan berani mengambil risiko untuk memajukan sekolah. Kepala Sekolah harus mampu mengembangkan dan memanfaatkan peluang yang ada untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. (4) Kompetensi Supervisi, kepala Sekolah harus mampu melakukan supervisi terhadap proses pembelajaran dan kinerja guru. Ini mencakup kemampuan untuk memberikan bimbingan dan saran perbaikan, serta melakukan evaluasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. (5) Kompetensi Sosial, kepala Sekolah harus memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan baik dengan seluruh warga sekolah dan masyarakat sekitar. Kompetensi ini mencakup kemampuan komunikasi, kerja sama, dan pengelolaan konflik, serta kemampuan untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan berbagai pihak terkait.

Sebagai pemimpin pendidikan, Kepala Sekolah bertanggung jawab untuk mengorganisasikan sekolah dan personil yang bekerja di dalamnya dalam lingkungan yang efektif, efisien, demokratis, dan kolaboratif. Di bawah kepemimpinannya, program pendidikan untuk para siswa harus direncanakan, diorganisasikan, dilaksanakan, dan dievaluasi dengan baik. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Sekolah harus memimpin secara profesional, mengarahkan staf pengajar untuk bekerja dengan pendekatan ilmiah, penuh perhatian, dan demokratis, serta selalu berfokus pada perbaikan berkelanjutan proses belajar mengajar. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 162 Tahun 2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, disebutkan bahwa tugas Kepala Sekolah dapat diringkas dalam akronim

EMASLEC, Educator (Pendidik), Manager (Manajer), Administrator (Administrator), Supervisor (Pengawas), Leader (Pemimpin), Entrepreneur (Wirausahawan), Climate Creator (Pencipta Iklim).

Kepala Sekolah harus mampu menggali dan mendayagunakan seluruh sumber daya sekolah secara terpadu dalam kerangka pencapaian tujuan sekolah secara efektif dan efisien. Tugas-tugas ini mencakup tidak hanya aspek pendidikan, tetapi juga manajemen dan pengembangan sekolah secara keseluruhan.

Penelitian tentang "Kebijakan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Fungsi Guru di SMPN 3 Peureulak" sangat relevan dalam konteks upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan fokus pada keterampilan manajemen dan kecerdasan yang harus dimiliki oleh Kepala Sekolah, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana kebijakan kepemimpinan yang tepat dapat memengaruhi fungsi dan kinerja guru. Penelitian ini juga akan membantu mengidentifikasi bagaimana Kepala Sekolah dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada, menciptakan lingkungan yang mendukung, dan memberdayakan guru untuk berperan lebih aktif dan efektif dalam proses pendidikan. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan dan praktik kepemimpinan yang lebih baik di lingkungan sekolah, khususnya dalam meningkatkan kualitas pendidikan di SMPN 3 Peureulak.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah sebuah studi kualitatif yang bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif berupa informasi tertulis dan lisan yang diperoleh dari subjek penelitian serta perilaku yang diamati. Fokus utama dari penelitian ini adalah menggambarkan situasi pelaksanaan manajemen Kepala Sekolah dalam meningkatkan fungsi guru di SMPN 3 Peureulak. Peneliti akan mengumpulkan data melalui berbagai sumber, termasuk dokumen tertulis, wawancara lisan dengan Kepala Sekolah dan guru, serta observasi langsung terhadap perilaku mereka di lapangan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif natural. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini berusaha untuk memahami dan menggambarkan realitas sosial yang kompleks, seperti perilaku, motivasi, dan tindakan dalam konteks yang spesifik dan alamiah. Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya peneliti akan menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis mengenai situasi yang terjadi di lapangan tanpa mengubah atau memanipulasi kondisi yang ada.

Sebagai penelitian lapangan (field research), penelitian ini berfokus pada pengumpulan data langsung dari SMPN 3 Peureulak, khususnya terkait dengan kebijakan Kepala Sekolah dalam meningkatkan fungsi guru. Dalam menentukan sampel, penelitian kualitatif ini tidak menggunakan perhitungan statistik seperti pada penelitian kuantitatif. Sebaliknya, sampel dipilih berdasarkan kemampuan mereka untuk memberikan informasi yang mendalam dan relevan, bukan untuk menghasilkan hasil yang dapat digeneralisasi.

Subjek penelitian ini adalah individu-individu yang memiliki hubungan langsung dengan pelaksanaan manajemen Kepala Sekolah dalam meningkatkan fungsi guru. Peneliti akan mewawancarai berbagai pihak, termasuk Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan siswa. Pemilihan subjek ini didasarkan pada relevansi mereka terhadap topik penelitian serta pengetahuan mereka tentang masalah yang sedang diteliti. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan manajemen Kepala Sekolah dalam konteks yang alamiah di SMPN 3 Peureulak.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa perumusan kebijakan dalam meningkatkan fungsi guru di SMPN 3 Peureulak diformulasikan oleh Kepala Sekolah dengan tujuan untuk menjamin mutu, meningkatkan kualitas tenaga pengajar serta peningkatan kemampuan siswa. Dalam merumuskan kebijakan, kepala Sekolah melibatkan seluruh unsur yang ada di sekolah tersebut agar kebijakan yang dibuat dapat terlaksana dengan baik.

Perumusan kebijakan yang dilakukan Kepala SMPN 3 Peureulak meliputi kebijakan pembelajaran, seperti: mengelaborasi kurikulum menjadi bahan ajar pada setiap mata pelajaran, menyediakan kelengkapan pengajaran, menyiapkan ruang kelas yang layak dan nyaman dipakai, melakukan supervisi kepada guru dan membina pertumbuhan jabatan melalui pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan. Perumusan Kebijakan Kepala Sekolah dalam meningkatkan fungsi guru di SMPN 3 Peureulak dilakukan dengan tiga tahapan yaitu:

- 1) Tahapan pertama formulasi yaitu merencanakan/membuat kebijakan yang akan diambil oleh Kepala SMPN 3 Peureulak diacukan pada tiga pilihan pokok pikiran, yakni proses identifikasi kebutuhan, sumber-sumber pikiran kebijakan dan penentuan tujuan kebijakan.

Identifikasi kebutuhan, Landasan proses berpikir dalam penentuan yang gilirannya dimuarakan menjadi program kebijakan di SMPN 3 Peureulak dapat dikategorikan kedalam beberapa jenis. Pertama, proses identifikasi kebutuhan dalam rangka perencanaan program kebijakan, langkah awal yang dilakukan

kepala SMPN 3 Peureulak adalah melakukan kajian secara sistematis, analitis, dan sistem substansional mengenai keseluruhan substansi-substansi persekolahan. Kedua, setelah substansi-substansi persekolahan teridentifikasi, selanjutnya adalah memantapkan visi SMPN 3 Peureulak secara tegas dan menjabarkan visi tersebut kedalam tujuan-tujuan institusional. Ketiga, penentuan kebijakan Kepala Sekolah tampak pula didasarkan pada masalah-masalah kongkrit yang ada. Keempat, kebutuhan kebijakan muncul akibat adanya gagasan-gagasan baru yang berasal dari hasil-hasil berbagai forum seperti hasil penataran, seminar lokakarya, dan rapat antar guru-guru.

Sumber-sumber pikiran kebijakan Kepala SMPN 3 Peureulak tidak memiliki perencanaan khusus berupa program-program secara tertulis. Gagasan kebijakan Kepala Sekolah timbul dari penilaian dan pengamatan selama perjalanan akademik. Dari pengamatan tersebut dapat diidentifikasi perihal apa saja yang memerlukan perbaikan. Oleh karena itu dari waktu ke waktu selalu timbul gagasan untuk melakukan suatu kebijakan. Demikian pula pelaksanaan kebijakan tersebut juga terus berkelanjutan. Gagasan kebijakan juga berasal dari Kepala Sekolah yang disampaikan dalam berbagai pertemuan dalam meningkatkan fungsi guru. Kebijakan kepala sekolah harus melibatkan partisipasi guru dan disampaikan dalam musyawarah dan rapat wali murid.

Penentuan tujuan kebijakan, yakni semua usaha kebijakan kepala SMPN 3 Peureulak arahnya dimuaraikan pada terjadinya perbaikan kualitas layanan belajar siswa. Ini artinya, segala bentuk dan jenis perbaikan serta berbagai implementasi gagasan inovatif bagi keseluruhan substansi sistem persekolahan yang ada di SMPN 3 Peureulak muara akhirnya adalah terwujudnya bentuk layanan belajar yang kondusif bagi kemudahan belajar anak.

- 2) Tahapan kedua adalah Implementasi kebijakan dilakukan dengan cara Pengubahan perilaku guru, yang dilakukan Kepala SMPN 3 Peureulak dalam berbagai pertemuan, seperti yang telah diuraikan dalam paparan pembinaan dan peningkatan fungsi guru.

Untuk mengimplementasikan pendekatan, konsep, teknik, maupun kebijakan yang baru dalam meningkatkan fungsi guru, Kepala SMPN 3 Peureulak mempersyaratkan pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk para guru dari kebijakan Kepala Sekolah. Untuk memenuhi persyaratan teknis, akademis dan sikap tersebut, SMPN 3 Peureulak melakukan langkah-langkah kongkrit untuk membekali guru-guru mempunyai pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan yang dipersyaratkan dari pengimplementasian kebijakan kepala Sekolah.

Langkah-langkah yang harus ditempuh oleh SMPN 3 Peureulak dalam kaitan ini, secara substansial dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu: (1) Peningkatan fungsi guru, sesuai data dan keterangan yang diperoleh di lapangan dalam kaitan dengan upaya pengubahan perilaku guru. Bertolak dari dua kajian tersebut, paparan pertama berkaitan dengan upaya pengubahan perilaku guru yang dilakukan kepala SMPN 3 Peureulak dalam rangka peningkatan fungsi guru.

Sebagaimana dipaparkan dalam kajian substansi kebijakan Kepala Sekolah, berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan fungsi guru di SMPN 3 Peureulak. Upaya-upaya tersebut meliputi pelibatan guru dalam berbagai kegiatan profesional seperti mengikutsertakan mereka dalam Kelompok Kerja Guru (KKG), pengiriman untuk mengikuti penataran, serta penyelenggaraan KKG internal di sekolah. Selain itu, guru-guru diberi kesempatan untuk melakukan studi banding, berkomunikasi dengan rekan sejawat, dan melakukan studi mandiri, serta terlibat dalam berbagai forum ilmiah.

Pembinaan sikap dan komitmen guru juga menjadi fokus penting, dilakukan secara berkala tanpa jadwal tetap, dan mencakup beberapa aspek krusial. Pembinaan ini meliputi peningkatan sikap terkait kinerja, pengembangan komitmen terhadap kemajuan SMPN 3 Peureulak, peningkatan disiplin, kesamaan pemahaman tentang visi sekolah, dukungan terhadap kepemimpinan Kepala Sekolah, serta dorongan untuk kreativitas dan sikap inovatif.

Hal ini sejalan dengan teori Syafaruddin mengenai faktor-faktor penting dalam mengimplementasikan kebijakan, yang mencakup komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana kebijakan, dan struktur birokrasi. Dalam konteks pendidikan, terdapat dua pendekatan dalam implementasi kebijakan: yang pertama adalah menerapkan kebijakan secara langsung melalui program-program pendidikan, dan yang kedua adalah melalui kebijakan turunan dari kebijakan pendidikan nasional yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal sekolah.

- 3) Tahapan Ketiga Evaluasi kebijakan, Setelah adanya pelaksanaan kebijakan kemudian diadakan pengevaluasian dalam kebijakan pendidikan tersebut.

Untuk menilai sejauh mana pelaksanaan kebijakan telah mencapai tujuannya, meskipun tidak ada penilaian khusus yang dilakukan, efektivitas inovasi secara umum dapat dilihat dari hasil belajar siswa. Jika hasil belajar siswa, seperti yang tercermin dalam ujian bulanan, ujian tengah semester, dan ujian semester, menunjukkan peningkatan, maka inovasi tersebut dianggap efektif. Selain itu, jika terdapat peningkatan nilai

murid dari tahun ke tahun, seperti yang tercatat dalam buku rapor, hal ini menunjukkan bahwa inovasi yang telah dilaksanakan berhasil.

Setiap guru juga bertanggung jawab untuk melakukan penilaian terhadap proses pembelajaran yang mereka kelola. Selain itu, rapat pembinaan guru-guru yang diadakan tanpa jadwal tetap berfungsi sebagai forum untuk menyampaikan kebijakan Kepala SMPN 3 Peureulak dan untuk mengidentifikasi serta mengatasi masalah yang dihadapi guru-guru selama proses mengajar. Oleh karena itu, setiap guru diharapkan untuk terus memikirkan alat dan metode baru dalam pengajaran. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Putt dan Springer dalam Syafaruddin, yang menyatakan bahwa evaluasi merupakan langkah penting untuk menerima umpan balik dalam proses kebijakan.

Agar guru tetap kreatif dan inovatif, SMPN 3 Peureulak selalu melibatkan guru-guru dalam berbagai forum seperti Kelompok Kerja Guru (KKG), pelatihan, lokakarya, dan seminar. Saat mengikuti pelatihan, seluruh biaya ditanggung oleh sekolah, sehingga guru tidak dibebani biaya apapun. Selain itu, sekolah juga rutin mengadakan musyawarah guru yang bertujuan untuk mencari metode baru dalam mengajar, guna meningkatkan hasil belajar siswa.

Dengan adanya forum-forum tersebut, guru-guru terus didorong untuk berpikir inovatif dalam pembelajaran. Kepala SMPN 3 Peureulak juga secara aktif memberikan peluang dan fasilitas bagi setiap ide baru yang diajukan oleh guru. Pendekatan ini telah berhasil meningkatkan semangat guru untuk terus berinovasi. Pertemuan supervisi yang diadakan tanpa jadwal tetap juga menjadi salah satu sarana untuk mendorong guru mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam mengajar.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan paparan data hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, ditemukan beberapa kesimpulan terkait kebijakan yang diambil oleh Kepala Sekolah dalam upaya meningkatkan fungsi guru di SMPN 3 Peureulak. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perumusan Kebijakan: Kepala SMPN 3 Peureulak merumuskan kebijakan melalui proses perencanaan yang diawali dengan identifikasi kebutuhan. Proses ini mencakup pemanfaatan berbagai sumber pemikiran kebijakan, termasuk gagasan-gagasan baru yang diperoleh dari hasil musyawarah, diskusi, dan forum rapat.
2. Implementasi Kebijakan: Setelah kebijakan dirumuskan, tahap berikutnya adalah implementasi kebijakan. Ini dilakukan dengan melibatkan seluruh elemen sekolah dan memastikan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik.
3. Evaluasi Kebijakan: Kebijakan yang telah diimplementasikan kemudian dievaluasi untuk menilai efektivitasnya. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa tujuan kebijakan tercapai dan memberikan manfaat nyata dalam peningkatan fungsi guru di sekolah tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bafadal, Ibrahim, *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasa dari Sentralisasi Menuju Desentralisasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003
- [2] Basri, Hasan, *Kepemimpinan Kepala Sekolah*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- [3] Bungin, M. Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2008.
- [4] Danim, Sudarwan, *Profesionalisasi dan Etika Profesi*, Guru Bandung: Alfabeta, 2010.
- [5] Fatah, Nanang, *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) & Dewan Sekolah*, Bandung: Bani Quraisy, 2004.
- [6] Girling, dan Keith dalam buku Rohiat, *Manajemen Sekolah-Teori Dasar dan Praktik*, Bandung, PT Refika Aditama, 2008.
- [7] Hamalik, Oemar, *Manajemen Pendidikan dan Latihan*, Bandung: Y.P. Pemindo, 2003.
- [8] Istiqomah dan Muhammad Sulton, *Sukses Uji Kompetensi Guru*, Jakarta: Dunia Cerdas, 2013.
- [9] Kusnandar, *Guru Profesional, Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Jakarta: Rajawali Press, 2007.
- [10] Mantja W, *Manajemen Pendidikan dan Supervisi Pengajaran*, Malang: Wineka Media, 2005.
- [11] Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011.
- [12] Mulyasa, E, *Manajemen Berbasis Sekolah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- [13] Pariansyah Doni Juni dan Rismi Somad, *Manajemen supervisi dan kepemimpinan Kepala Sekolah*, Bandung: Alfabeta, 2014.